

**HAMBATAN IMPLEMENTASI PROGRAM PERLINDUNGAN
ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM)
DALAM MENGATASI KASUS KEKERASAN PADA ANAK DI
KOTA PADANG TAHUN 2022 – 2024**

SKRIPSI

Oleh:



Dosen Pembimbing :

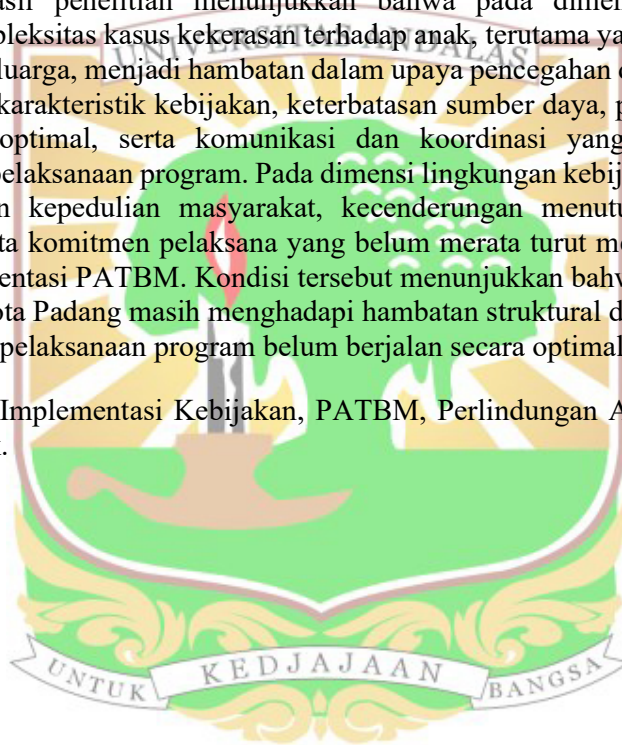
- 1. Dr. Doni Hendrik, M.Soc.Sc.**
- 2. Mhd Fajri, S.IP,MA.**

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2026**

ABSTRAK

Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) merupakan inisiatif Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) yang dirancang sebagai upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak melalui keterlibatan masyarakat di tingkat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan implementasi PATBM di Kota Padang pada tahun 2022–2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier (1983) yang mencakup tiga dimensi, yaitu karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, dan lingkungan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi karakteristik masalah, kompleksitas kasus kekerasan terhadap anak, terutama yang terjadi dalam lingkungan keluarga, menjadi hambatan dalam upaya pencegahan dan penanganan. Pada dimensi karakteristik kebijakan, keterbatasan sumber daya, pembagian tugas yang belum optimal, serta komunikasi dan koordinasi yang belum efektif menghambat pelaksanaan program. Pada dimensi lingkungan kebijakan, rendahnya partisipasi dan kepedulian masyarakat, kecenderungan menutup-nutupi kasus kekerasan, serta komitmen pelaksana yang belum merata turut menjadi hambatan dalam implementasi PATBM. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi PATBM di Kota Padang masih menghadapi hambatan struktural dan kultural yang menyebabkan pelaksanaan program belum berjalan secara optimal.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, PATBM, Perlindungan Anak, Kekerasan terhadap Anak.



ABSTRACT

The Community-Based Integrated Child Protection Program (PATBM) is an initiative of the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (KemenPPPA) designed to prevent and address violence against children through community involvement at the local level. This study aims to analyze the barriers to the implementation of PATBM in Padang City from 2022 to 2024. This research employed a qualitative method with a descriptive approach and a case study design. Data were collected through interviews and document analysis and were analyzed using the policy implementation theory of Mazmanian and Sabatier (1983), which consists of three dimensions: problem characteristics, policy characteristics, and policy environment. The findings show that, in terms of problem characteristics, the complexity of cases of violence against children, particularly those occurring within families, poses a barrier to prevention and response efforts. In terms of policy characteristics, limited resources, suboptimal division of responsibilities, and ineffective communication and coordination hinder program implementation. In terms of the policy environment, low levels of community participation and awareness, the tendency to conceal cases of violence, and uneven commitment among implementers also constitute barriers to PATBM implementation. These conditions indicate that the implementation of PATBM in Padang City continues to face structural and cultural barriers, resulting in the program not yet being implemented optimally.

Keywords: Policy Implementation, PATBM, Child Protection, Violence against Children.

